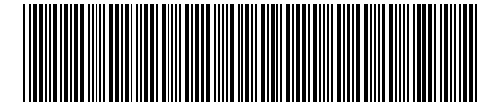




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.408778/2020**



DS:9301-5432-4454-6678

**Revisi ke 04**

Tanggal : 23 Desember 2020

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (09)     | DITJEN HAK ASASI MANUSIA  |
| 3. Provinsi                   | : (19)     | SULAWESI SELATAN  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (408778) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 281.828.000 ( DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM  
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	281.828.000
Rp.	281.828.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	281.828.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                     |           |             |
|---------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN MAKASSAR II | (136) Rp. | 281.828.000 |
|---------------------|-----------|-------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Harun Sulianto  
Bendahara Pengeluaran : SAFRI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : SIRAJUDDIN

Halaman : IA.1

1	Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		281.828.000
	Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		281.828.000
2	Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM		281.828.000
	Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
	Indikator Kinerja Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70 Persen	
		02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15 Persen	
		03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10 Persen	
		04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 Persen	
		05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75 Persen	
		06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1 Rekomendasi	
		07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60 Persen	
	Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
	Indikator Output Program	01	Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	70 Persen	
		02	Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM	15 Persen	
		03	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	10 Persen	
		04	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50 Persen	
		05	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	75 Persen	
		06	Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	1 Rekomendasi	
		07	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang di tindaklanjuti	60 Persen	
	Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		281.828.000
	Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
		02	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
		02	jumlah kab/kota peduli HAM		
		03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		
		01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Harun Sulianto  
Bendahara Pengeluaran : SAFRI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : SIRAJUDDIN

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 rekomendasi	112.612.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM	99 rekomendasi	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	5 Instansi Pemerintah	169.216.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	1 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/Kota	

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

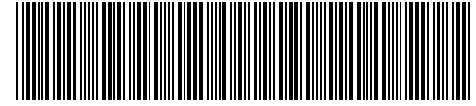
ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020**

**I B. SUMBER DANA**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	281.828.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	281.828.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408778	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	281.828	-	-	-	281.828		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	281.828	-	-	-	281.828		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	281.828	-	-	-	281.828		
5255.001	Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	112.612	-	-	-	112.612	19 . 51	
01	RM	-	112.612	-	-	-	112.612	136	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	169.216	-	-	-	169.216	19 . 51	
01	RM	-	169.216	-	-	-	169.216	136	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>281.828</b>	-	-	-	<b>281.828</b>		

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408778) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408778	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	12.273	26.070	9.066	0	45.811	44.025	21.240	42.211	0	43.513	37.619	281.828
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	12.273	26.070	9.066	0	45.811	44.025	21.240	42.211	0	43.513	37.619	281.828
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	12.273	26.070	9.066	0	45.811	44.025	21.240	42.211	0	43.513	37.619	281.828
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	12.273	26.070	9.066	0	45.811	44.025	21.240	42.211	0	43.513	37.619	281.828

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
IV A. B L O K I R**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408778] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : DIPA- 013.09.2.408778/2020  
IV B. C A T A T A N**



DS:9301-5432-4454-6678

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408778] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.  
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH  
NIP 196211211982031001